PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Kota Bandung)

MUHAMMAD AKMAL FALAH - 21112081

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2016
Email : akmalfalah8@gmail.com

ABSTRACT

In 2015, the tax revenue target is not reached it in the causes of their problems taxpayer data that is inaccurate resulting from the tax system This study aims to (1) determine how large the influence of system Modern Tax Administration on tax revenue (2) determine how big Effect of tax audit on tax revenues.

The method used in this research is descriptive method verification with quantitative approach. Sampling techniques in this study using a purposive sample. The unit of analysis in this study is Tegalega KPP and KPP Majalaya observation units in this study is part of PDI and inspection. Verification analysis in this study using multiple linear regression statistical tests using SPSS V.21 software.

The results of this study were (1) Modern Tax Administration System effects against tax revenue and (2) tax audit effects on tax revenue.

Keywords : Modern Tax Administration System, Tax Audit, Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengeluaran rutin pemerintah dibiayai oleh sumber utama penerimaan pemerintah yaitu pajak, Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya administrasi perpajakan, untuk administrasi pajak pusat, diemban oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan, Misi yang dilakukan adalah misi fiskal, yaitu untuk mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang dapat menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Sinta Setiana, et. Al. 2010).

Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih saja sama, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-undang (Anshari Ritonga, 2010).

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Rapina, et al. 2011).

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan, Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi perpajakan sejak dua dekade yang lalu, Modernisasi perpajakan di awali pada tahun 1983 dengan melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan perpajakan (Siti Aminah, 2014).

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan system administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan good governance (Rahayu dan Lingga, 2009).

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peneriman negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukakan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Salip dan Tendi wanto, 2006).

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi, 2006:8).Meski jumlah pemeriksaan pajak terus meningkat namun hingga akhir tahun 2015 jumlah penerimaan pajak tetap tidak tercapai (Hestu yoga:2016)

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan pajak belum optimal disebabkan sampai saat ini pemerintah masih kesulitan mendapatkan data dan informasi secara akurat.
2. Pemeriksaan Pajak harus di tingkatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak.
2. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud dan tujun Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapat kebenaran mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Bagi Perusahaan
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan, mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
3. Bagi Pihak-Pihak Lainnya
   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan gambaran yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Pengembangan Ilmu
   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran dalam ilmu Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Marcus Taufan Sofyan (2005:53) menyatakan bahwa :

"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001".

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:125) menyatakan bahwa :

"Sistem administrasi perpajakan modern adalah upaya yang dilakukan pemerintah tentunya untuk mencapai target penerimaan pajak , selain itu juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan".

2.1.1.2 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tujuan dari Sistem Administrasi perpajakan Modern adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak selain itu untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak. Adapun tujuan dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:78) adalah :

1."Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai aliran dana untuk mengisi kas Negara.

2. Menekankan terjadinya penyelundupan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak.

3 Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.

4. Menerapkan konsep good governance, adanya transparansi, responsibility, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.

5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak".

2.1.1.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Carlos A.Silvani (2006:72) seperti yang dikutip oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:93) menyebutkan bahwa administrasi perpajakan modern dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah seperti :

a. Wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*)
   Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi akan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

b. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

c Penyelundupan Pajak (*Tax Evaders*)

Penyelundupan pajak yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari utang yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

d. Penunggakan Pajak (*Delinquent payers*)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang lebih baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Dari indikator tersebut, peneliti menggunakan indikator untuk variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, yaitu:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:52) menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) menyatakan bahwa :

"Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakanlebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

2.1.2.3 Indikator Pemeriksaan pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 248) adalah sebagai berikut:
"Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa".

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105), adalah sebagai berikut:
"Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan". Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang tentang anggaran".

Penerimaan pajak menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah:
"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

2.1.3.2 Faktor- Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1."Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undangundang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Sedangkan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah sebagai berikut:

"Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Administasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:125) Sistem administrasi perpajakan modern merupakan upaya yang dilakukan pemerintah tentunya untuk mencapai target penerimaan pajak , selain itu juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan".

Beberapa penelitian mengenai pengaruh sistem adminisitrasi Perpajakan modern terhadap penerimaan pajak telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lusi (2008) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan pada KPP BUMN. Hasil penelitian menunjukan bahwa jika Wajib Pajak patuh meningkat maka jumlah penerimaan tiap tahunnya juga mengalami kenaikan dan sebaliknya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka diterapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh nyata dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP BUMN.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) pemeriksaan pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Menurut widi widodo (2010:197) pemeriksaan merupakan suatu instrument yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya yuridiksi yang menggunakan perhitungan sendiri dengan tujuan penerimaan pajak yang meningkat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sabilla Fitrialdini (2014) dengan Penelitian yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Survey Pada KPP Yang Terdaftar Di Kanwil Wilayah Jawa Barat I. Hasil Penelitian

menunjukan bahwa Pengaruh Pemeriksaan Pajak maupun Pelaksanaan PenagihanPajak terhadap Penerimaan Pajak berpengaruh positif yang berarti jika semakin besar dan pemeriksaan pajak pelaksanaan penagihan pajak maka penerimaan pajak akan tinggi.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diambil adalah :

H1: Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, terlebih dahulu perlu ditentukan objek penelitian. Objek penelitian menurut Sugiyono (2011:64) yaitu :

> "Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegatan yang mempunyai varibel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Umi Narimawati dkk (2010:29) menyatakan bahawa :

"Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiono dalam Umi Narimawati dkk (2010:29) adalah sebagai berikut :

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau `menganalisis suatu hasil Penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri dalam Umi Narimawati dkk. (2010:29) menyatakan bahwa :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mangatasi masalah yang serupa".

Menurut Sugiyono (2013:8) metode penelitian kuantitatif adalah:

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Menurut Sumadi (2013:29) definisi operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut :
"Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain".

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Toni Wijaya (2013:19) data sekunder adalah:
"Data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap dipakai".
Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut.

Sedangkan menurut Bungin (2013:129) sumber data sekunder adalah:
"Sumber data kedua setelah sumber data primer".

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak dan penerimaan pajak pada kantor paelayanan pajak pratama Majalaya.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Hendri Tanjung, 2013:115) menyatakan bahwa :
"Teknik pengumpulan data dibagi ke dalam dua bagian, yaitu berdasarkan sumber data (primer dan sekunder). Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi melalui media cetak atau media elektronik".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan.
2) Riset Internet *(online research)*
   Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, sampel, tempat dan waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut sugiyono (2012:15) menjelaskan populasi sebagai berikut:
"Wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain".

Berdasarkan pengertian diatas, populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 16 Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Berikut merupakan daftar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Daftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

No	Kode	Dafta KPP
1	444	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya
2	422	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

3.4.2 Penrikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah
"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. Pengertian *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2013:84) adalah sebagai berikut:

"Sampling Purposive adalah teknik penentuan data sampel dengan pertimbangan tertentu*"*.

Kriteria yang dipilih oleh penulis dalam menentukkan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang diambil merupakan jumlah waib pajak yang tidak menyampaikan SPT, jumlah tunggakan pajak dan jumlah penerimaan pajak yang ada pada KPP Majalaya dan KPP Tegallega Periode 2011 – 2015.
2. Data yang diambil merupaka data yang sudah di klasifikasikan setiap 4 bulan sekali selama periode 2011 – 2015.

Menurut (Uma Sekaran, 2011:136) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel, yaitu sebagai berikut :

"Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel adalah 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian dan untuk ukuran sampel minimum adalah 30 yang dipecah ke dalam subsampel adalah tepat untuk kebanyakan penelitian".

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengadakan penelitan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawabarat 1.Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016

3.5 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, Maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

Didalam penggunaan analisis linear berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Albert Kurniawan, 2010:52) regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

"Analisis regresi linier berganda pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independen*/bebas dari 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan penggunaan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*)".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel *dependent*, bila dua atau lebih variabel *independent* sebagai indikator.

3.6 Pengujian Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikutHipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Penerimaan Pajak.

Ho $\beta_1 = 0$: Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_a $\beta_1 \neq 0$: Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

b.Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas Pemeriksaan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

Ho : $\beta_i = 0$: Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_a $\beta_1 \neq 0$: Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

IV HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Perolehan dari data kuantitatif akan dipaparkan sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik agar mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian

4.1.1.1 Hasil Analisis deskriptif Sistem Administrasi perpajakan Modern

Rata-rata data yang sudah diolah mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern di KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegalega memiliki *trendline* yang cenderung fluktuatif. Jika dilihat dari data per 3 bulan selama 5 tahun jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tetap mengalami kenaikan dikarenakan tingkat motivasi wajib pajak meningkat sehingga wajib pajak yang menyampaikan mengalami kenaikan

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Rata- rata data yang sudah diolah bahwa Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegalega memiliki *trendline* yang cenderung fluktuatif. Jika dilihat dari data per 3 bulan selama 5 tahun jumlah Pemeriksaan Pajak tetap mengalami kenaikan seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas. Akan tetapi pemeriksaan pajak

dengan jumlah terendah berada di bulan september tahun 2011 dan jumlah tertinggi berada di bulan juni tahun 2013

4.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Rata – rata penerimaan pajak terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegalega memiliki *trendline* yang cenderung meningkat dengan jumlah penerimaan pajak tertinggi mencapai 159,78% terjadi pada bulan November tahun 2013, sedangkan jumlah penerimaan terendah sebesar yang terjadi pada bulan juli tahun 2013

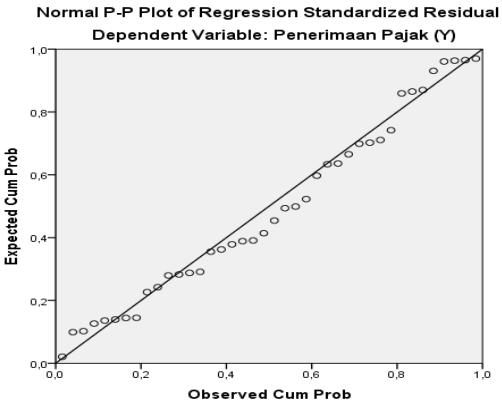
4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji *normalitas,* uji *multikolinieritas,* uji *heteroskedastistias* dan uji *autokorelasi.* Dari ke empat pengujian tersebut bahwa data yang di dapat dan diolah sudah memenuhi kriteria atau sudah terpenuhi. Atau dapat di jelaskan sebagai berikut,

a. Uji Normalitas

   Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized residual* dan *Kolmogorov-Smirnov*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data residual tersebut telah normal.



Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas terbukti dari normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	,000
	Std. Deviation	19,291
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		,558
Asymp. Sig. (2-tailed)		,914

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,914. Nilai signifikansi (*p-value*) tersebut lebih besar dari 0,05 (Singgih Santoso, 2012:393), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji *Multikolinearitas* bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/ hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai *tolerance* harus lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 (Gujarati, 2012: 362).

Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Administrasi (X1)	,794	1,260
	Pemeriksaan Pajak (X2)	,794	1,260

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

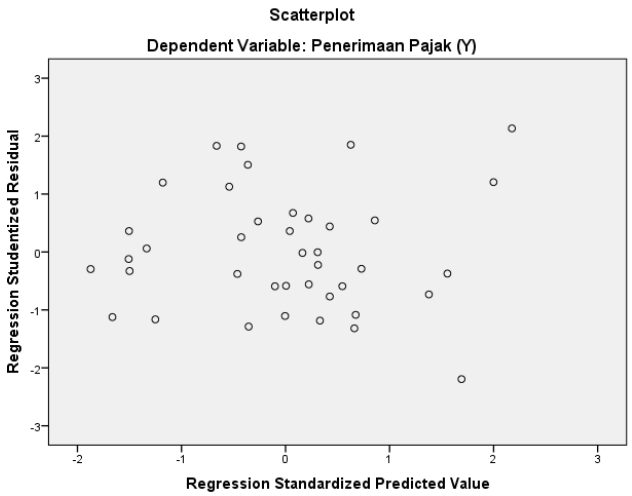
Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinieritas.*

c. Uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesalahan atau ketidaksamaan *variance* pada residual *(error)* dari suatu pengamatan ke pengamatan lain (Husein Umar, 2011:179). Untuk menguji adanya gejala *heteroskedastisitas* digunakan pengujian dengan metode uji *scatter plot*, dengan kriteria hasil sebagai berikut :

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

d. Uji autokorelasi

Berikut adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan analisis *durbin watson* (dw).

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,542[a]	,293	,255	19,80597	1,341

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X2), Sistem Administrasi (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai dw sebesar 1,341. Menurut (Jonathan Sarwono, 2012:28) terjadi autokorelasi jika durbin watson sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai dw (1,341) < 3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 68{,}879 + 0{,}001X_1 + 0{,}122X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar 68,879, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajak akan bernilai sebesar 68,879%.

b. Nilai sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,001, memiliki arti bahwa jika sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan sebesar 1 orang sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar 0,001%.
c. Nilai pemeriksaan pajak sebesar 0,122, memiliki arti bahwa jika pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 SKPKB sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar 0,122%

4.1.2.3 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertuuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara 2 variabel. Korelasi tidak menunjukan hubungan fungsional, dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis korelasi yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *pearson product moment*. Hasil perhitungan dapat dilihat di daftar lampiran .

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara sistem administrasi perpajakan modern dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,461. Nilai 0,461 menurut (Sugiono, 2013:250) berada pada interval 0,40 − 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara sistem administrasi perpajakan modern dengan penerimaan pajak, dimana semakin baik sistem administrasi perpajakan modern maka akan diikuti semakin tingginya penerimaan pajak.

Sedangkan informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,463. Nilai 0,463 menurut (Sugiono, 2013:250) berada pada interval 0,40 − 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak, dimana semakin baik pemeriksaan pajak maka akan diikuti semakin tingginya penerimaan pajak.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menenrangkan variabel independen Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

Correlations

		Penerimaan Pajak (Y)
Sistem Administrasi (X1)	Pearson Correlation	,461
Pemeriksaan Pajak (X2)	Pearson Correlation	,463

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus KD = r^2 x 100%:

1. Variabel sistem administrasi perpajakan modern = $(0,461)^2$ x 100% = 21,21%
2. Variabel pemeriksaan pajak = $(0,463)^2$ x 100% = 21,46%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak memberikan kontribusi paling dominan terhadap penerimaan pajak sebesar 21,46% dan diikuti sistem administrasi perpajakan modern sebesar 21,21%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

1. Pengujian Hipotesis Pertama Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

   H_0 (Hipótesis Nol)

   H_0: $\beta_1=0$ Sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung

   H_a: $\beta_1 \neq 0$ Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung

   Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 37, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2,026 dan 2,026

   Kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel,}$ terima H_a Tolak H_a jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0

   Dari hasil output SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk sistem administrasi perpajakan modern (X_1) sebesar 2,032 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,026. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,032 > 2,026) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

   H_0 (Hipótesis Nol)

   H_0: $\beta_2= 0$ Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung

   H_a: $\beta_2 \neq 0$ Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung

   Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 37, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2,026 dan 2,026

   Kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel,}$ terima H_a

   Tolak H_a jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0

   Dari tabel 4.15 *output* SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk pemeriksaan pajak (X_2) sebesar 2,064 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,026. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,064 > 2,026) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara Sistem administrasi Perpajakan Modern dengan Penerimaan Pajak sebesar 21,21% sedangkan 78,79% di pengaruhi oleh variabel variabel lain yang tak di teliti seperti kesadaran membayar pajak, kepatuhan membayar pajak dan sosialisasi terhadap wajib pajak Dengan nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah dimana semakin baik sistem administrasi perpajakan modern maka akan semakin tinggi jumlah penerimaan pajak

Hasil pengujian hipotesis antara sistem administrasi perpajakan modern dan penerimaan pajak bahwa nilai t_{hitung} yang di peroleh dari sistem administrasi perpajakan modern berada diluar nilai t_{tabel}. Dari pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.Hasil penelitian ini juga di dukung oleh teori penghubung dari Siti Kurnia rahayu (2010:125) Sistem administrasi perpajakan modern adalah upaya yang dilakukan

pemerintah tentunya untuk mencapai target penerimaan pajak , selain itu juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan.

Hasil penelitian juga sejalan oleh jurnal sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Desi Kusuma Dewi (2010) menyatakan bahwa sistem administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak.

4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 21,46% sedangkan 78,54% di pengaruhi oleh faktor ain yang tidak di teliti seperti kepatuhan membayar pajak,kesadaran membayar pajak dan sosialisasi terhadap wajib pajak. Dengan nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah dimana semakin baik kualitas pemeriksaan pajak maka akan semakin tinggi jumlah penerimaan pajak.

Hasil pengujian hipotesis antara Pemeriksaan Pajak dan penerimaan pajak bahwa nilai t_{hitung} yang di peroleh dari pemeriksaan pajak berada diluar nilai t_{tabel}. Dari pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh teori penghubung dari Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) pemeriksaan pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Menurut Salip dan Tendi Wanto (2006) menyatakan bahwa Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peneriman negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukakan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung artinya ketika kualitas sistem administrasi perpajakan modern semakin baik maka penerimaan pajak akan meningkat hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak berada pada kriteria cukup kuat.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Bandung. Artinya ketika kualitas pemeriksaan pajak semakin baik maka penerimaan pajak akan smeningkat hubungan antara system administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak berada pad kriteria cukup kuat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Oprasional

1. Masalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern terjadi karena masih adanya wajib pajak yang tidak paham mengenai cara pengisian SPT sehingga jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pun tidak optimal maka pemerintah harus mengambil tindakan untuk masalah ini dengan memberikan sosisalisasi terhadap wajib pajak dan memperbaiki kualitas sistem administrasi perpajakan modern dengan cara memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak agar penerimaan pajak pun meningkat.
2. Masalah Pemeriksaan pajak yang terjadi karena wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar, maka pemerintah harus mengambil tindakan seperti memberikan edukasi mengenai cara pengisian SPT yang baik dan benar terhadap wajib pajak agar kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pun meningkat agar penerimaan pajak meningkat.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan pemeriksaan pajak.

Selain itu peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Hendroharto. 2006. *Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Paja*k Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Magister Sains pada Universitas Indonesia Jakarta.

Albert Kurniawan. 2010. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom

Anshari Ritonga. "*Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak*". www.okezone.com.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.

Desi Kusuma Dewi. 2010. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak* Di Wilayah Kota Bandung.

Gujarati, D.N.,2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5.

Husein Umar, 2005*. Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jonathan Sarwono. 2012. *Path Analysys, Teori, Aplikasi, Prosedur Analisi untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Lusi. 2008. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan* pada KPP BUMN.

Marcus Taufan Sofyan. *Perpajakan*. Bandung: Gramedia

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Rapina, et al. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.(Survey terhadap KPP Pratama Bandung Cibeunying).

Hestu Yoga. 2016. Katadata.co.id

Salip, dan Tendy Wato. *Jurnal Keuangan Publik*. 2006.

Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.

Sinta setiana, Tan Kwang dan Lidya Agustina. 2010. *Pengaruh Penerapan sistem adminitrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak*(survey terhadap kantor pelayanan pajak Bandung Bojonegara). Bandung: Universitas Kristen Maranatha.

Siti Aminah. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Adminidtrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (survey terhadap kantor pelayanan pajak kota Surakarta). Surakarta: Universtas Muhammadiyah.

Siti Kurnia Rahayu 2010*. Perpajakan Indonesia* : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep,Teori,dan Isu, Satu*,Jakarta: 2006

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,

Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
Sumadi Suryabrata. 2013*. Metlit.* Cetakan ke 24.Jakarta : Raja Grafindo.
Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.
Tanjung dan Devi 2013. *Metedeologi Penelitian Islam*. Bekasi: Gramatika Publishing.
Umi Narimawati dkk. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
Waluyo. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta

DAFTAR LAMPIRAN

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	,000
	Std. Deviation	19,291
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		,558
Asymp. Sig. (2-tailed)		,914

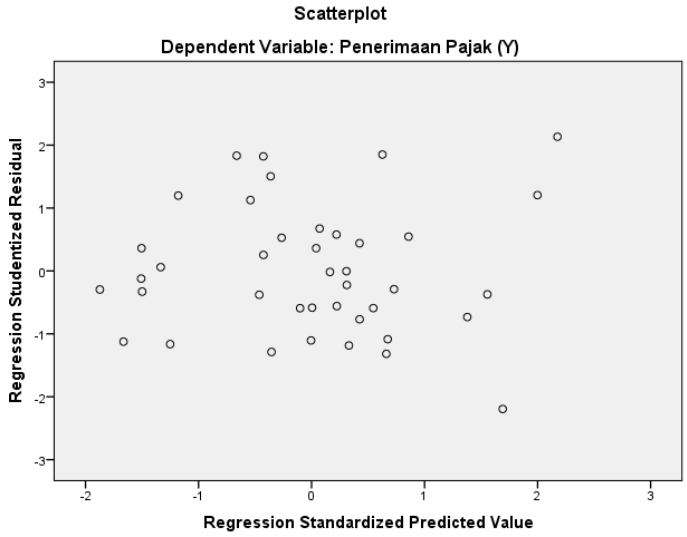
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Administrasi (X1)	,794	1,260
	Pemeriksaan Pajak (X2)	,794	1,260

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)



Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,542[a]	,293	,255	19,80597	1,341

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X2), Sistem Administrasi (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Koefisien Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	68,879	7,918		8,700	,000
	Sistem Administrasi (X1)	,001	,000	,315	2,032	,049
	Pemeriksaan Pajak (X2)	,122	,059	,320	2,064	,046

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Koefisien Korelasi X_1

Correlations

		Sistem Administrasi (X1)	Penerimaan Pajak (Y)
Sistem Administrasi (X1)	Pearson Correlation	1	,461**
	Sig. (2-tailed)		,003
	N	40	40
Penerimaan Pajak (Y)	Pearson Correlation	,461**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	
	N	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Koefisien Korelasi X_2

Correlations

		Pemeriksaan Pajak (X2)	Penerimaan Pajak (Y)
Pemeriksaan Pajak (X2)	Pearson Correlation	1	,463**
	Sig. (2-tailed)		,003
	N	40	40
Penerimaan Pajak (Y)	Pearson Correlation	,463**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	
	N	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	68,879	7,918		8,700	,000
	Sistem Administrasi (X1)	,001	,000	,315	2,032	,049
	Pemeriksaan Pajak (X2)	,122	,059	,320	2,064	,046

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)